

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN TUNGGAKAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DELLA VICTORYA
8335132379**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

***THE INFLUENCE OF TOTAL TAXPAYERS, AND TAX
ARREARS ON LAND AND BUILDING TAX OF RURAL AND
URBAN AREAS REVENUES IN THE ADMINISTRATIVE CITY
OF EAST JAKARTA***

**DELLA VICTORYA
8335132379**



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

DELLA VICTORYA. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Administrasi Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2 wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 Kecamatan. Periode penelitian ini yaitu tahun 2013-2016.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel seluruh kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 24. Hasil analisis membuktikan bahwa tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PBB-P2. Sedangkan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2.

Kata Kunci : Jumlah Wajib Pajak, Tunggakan Pajak, Penerimaan PBB-P2.

ABSTRACT

DELLA VICTORYA. The Influence Of Total Taxpayers, and Tax Arrears On Land And Building Tax of Rural And Urban Areas Revenues In The Administrative City Of East Jakarta. Faculty of Economics. State University of Jakarta

This research aimed to analyze the influence of the total taxpayers and tax arrears on land and building tax of rural and urban areas revenues in the administrative city of East Jakarta. The data used in this study were obtained from Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) of Jakarta. The data encompasses of the total of tax payers, tax arrears and land and building tax of rural and urban areas revenues in the administrative city of East Jakarta, which, consist of 10 districts.

The period of the study is in 2013-2016. This study uses secondary data with samples from all of the sub districts in the administrative city of East Jakarta. This study used multiple linear regression analysis to test the hypothesis with the help of SPSS 24. The results of the analysis prove that tax arrears have a significant positive effect on land and building tax of rural and urban areas revenues, while, the total of taxpayers doesn't affect land and building tax of rural and urban areas revenues.

Keywords : total tax payers, tax arrears, Land And Building Tax of Rural And Urban Areas Revenues

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

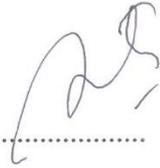
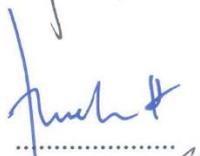
Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Tanggal</u>
<u>Erika Takidah, S.E, M.Si</u> NIP. 19751111 200912 2 001	Ketua Penguji		8 Agustus 2017
<u>Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770517 201012 1 002	Sekretaris		8 Agustus 2017
<u>Susi Indriani, S.E, M.S.Ak</u> NIP. 19760820 200912 2 001	Penguji Ahli		8 Agustus 2017
<u>Nuramalia Hasanah, S.E, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing 1		8 Agustus 2017
<u>Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing II		18 Agustus 2017

Tanggal Lulus : 1 Agustus 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah di publikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, 2 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan



Della Victorya

NIM. 8335132379

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Administrasi Jakarta Timur”

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama proses penelitian, peneliti mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Mama dan Papa yang telah memberikan semangat, motivasi, doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti;
2. Abang dan kakak, Dinal Arnanda, Intan Ramadiani, Dinal Agara Cipta, dan Reniza Fitriyeni, yang selalu memberikan doa dan dukungannya;
3. Keponakan-keponakan, Valesca Allenzio Arnanda dan Raihan Azzaky Diarzhafin, yang menjadi *moodbooster* untuk peneliti di rumah;
4. Aditya Pratama dan Lisa Irsanty Zulkarnain, saudara sepupu yang paling dekat, tempat *sharing*, dan selalu memberikan semangat;
5. Keluarga besar Agus Samar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti;

6. Bapak Dr. Dedi Purwana, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
7. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi;
8. Ibu Nuramalia Hasanah, S.E.,M.Ak., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti;
9. Bapak Tresno Eka Jaya, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti;
10. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti duduk di bangku perkuliahan;
11. Clara Amalia, sahabat dari jaman SD, SMP, SMA yang selalu satu sekolah dan juga satu kampus, yang paling setia dengerin semua cerita permasalahan skripsi peneliti, memberi saran, dan memberi semangat;
12. Arsyia Dewi Madina, Annisa Luthfi, dan Fitria Suharyani, sahabat dari jaman SMA kelas 1, yang selalu memberi semangat dan menghibur;
13. PLEASE, ada Lala, Arsyia, Mia, Eki, Veren, Lia, Rafni, Ghifari, Gavi dan Amos, yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat;
14. Dian Chaerani, Nurul Aziziyah, Asri Mahyudi, dan Immanuel Mangasi Fernando, sahabat yang selama 4 tahun ini berjuang bareng suka dan duka di Akuntansi, yang saling membantu, menghibur, mendukung dan memberi semangat;

15. Teman-teman Akuntansi Reguler D 2013 yang selama 4 tahun ini sudah mengisi hari-hari di kampus, yang saling membantu dan memberikan semangat;

16. Teman-teman Akuntansi 2013 yang selama 4 tahun ini sudah berjuang bareng dan saling membantu terutama saat perjuangan skripsi;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak.

Jakarta, Agustus 2017

Della Victorya

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual	11
1. <i>Grand Theory</i>	11
2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12
3. Jumlah Wajib Pajak.....	19
4. Tunggakan Pajak	20
B. Hasil Penelitian yang Relevan	22
C. Kerangka Teoritik.....	28
D. Perumusan Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	34
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	34
C. Metode Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	36
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	47
1. Statistik Deskriptif.....	47
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Analisis Regresi Linier Berganda	58
B. Pengujian Hipotesis	60
1. Uji t.....	60
2. Uji f	61
3. Koefisien Determinasi.....	62
C. Pembahasan	63
1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2.....	63
2. Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2	66
3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PBB-P2	68

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi	71
C. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	77
-----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	91
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel II.1	Hasil Penelitian yang Relevan	24
Tabel III.1	Daftar Nama Kecamatan di Jakarta Timur	35
Tabel IV.1	Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel IV.2	Uji <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	53
Tabel IV.3	Uji Multikolonieritas	54
Tabel IV.4	Uji Autokorelasi	55
Tabel IV.5	Uji White	57
Tabel IV.6	Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel IV.7	Uji t	60
Tabel IV.8	Uji f	62
Tabel IV.9	Uji Koefisien Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar II.1	Kerangka Teoritik	30
Gambar IV.1	Grafik Histogram	51
Gambar IV.2	Grafik Normal P-Plot.....	52
Gambar IV.3	Uji Heteroskedastisitas-Scatterplot.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian untuk BPRD.....	78
Lampiran 2	Surat Pengantar PTSP Jakarta Pusat untuk BPRD	79
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian untuk BPRD.....	80
Lampiran 4	Surat Izin Riset dan Penelitian dari BPRD	81
Lampiran 5	Data Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)	82
Lampiran 6	Data Ln Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y)..	84
Lampiran 7	Hasil Pengujian dengan menggunakan SPSS 24	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu daerah penting untuk dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam segala aspek baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial budaya. Pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari kebutuhan finansial. Oleh sebab itu masing-masing daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber dana yang potensial guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber dana yang potensial diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dalam APBD tahun 2016 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 54,25% terhadap pendapatan daerah (<http://apbd.jakarta.go.id>). Dengan kontribusi yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

Pajak daerah terdiri atas berbagai jenis dan masing-masing daerah memiliki potensi penerimaan pajak yang berbeda-beda. Namun Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu menyumbang 20 persen dari keseluruhan target penerimaan pajak daerah. Dimana dalam APBD penerimaan pajak daerah merupakan

penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) (<http://poskotanews.com>). Hal tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 juga berperan penting sehingga perlu dimaksimalkan penerimaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada bumi dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. PBB terbagi atas 5 sektor yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada awalnya PBB merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan hampir seluruh penerimaan PBB diberikan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan porsi tertentu. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jangka waktu transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2, 2014).

Selama masa transisi tersebut, daerah yang sudah siap dapat segera melaksanakan pemungutan PBB-P2, namun sebelumnya wajib membuat Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sehingga terhitung tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 diharapkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah seluruhnya melaksanakan pengelolaan PBB-

P2. Sementara untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih merupakan Pajak Pusat. (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2, 2014)

Dengan adanya pengalihan wewenang ini maka seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan dengan PBB-P2 akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mulai diwajibkan untuk memungut PBB-P2 sejak tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu sejak tahun 2013 seluruh penerimaan PBB-P2 akan masuk ke pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang dikutip dari *website* Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), sebagai gambaran perkembangan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2015 pada tahun pertama yaitu tahun 2013 target penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,6 Trilyun. Namun untuk realisasi belum mencapai target yang ditentukan yaitu hanya sebesar 3,4 Trilyun. Pada tahun 2014 target penerimaan naik menjadi 6,5 Trilyun sementara realisasi penerimaan juga mengalami kenaikan namun masih belum mampu mencapai target yaitu hanya sebesar 5,8 Trilyun. Untuk tahun 2015 target penerimaan juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,1 Trilyun sementara realisasi penerimaan juga mengalami kenaikan namun masih belum mencapai target

yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 6,7 Trilyun. Pada tahun 2016 target penerimaan diturunkan menjadi 6,4 Trilyun. (<http://bprd.jakarta.go.id>)

Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya selalu meningkat. Namun angka realisasi penerimaan PBB-P2 tersebut tidak pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal dan masih terdapat potensi PBB-P2 yang belum tertagih.

Selain itu target penerimaan PBB-P2 terjadi penurunan dari tahun 2015 sebesar Rp. 7,1 Trilyun menjadi Rp. 6,4 Trilyun di tahun 2016. Penurunan target ini disebabkan karena adanya kebijakan penghapusan PBB-P2 untuk NJOP dibawah Rp. 1 Milyar berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas rumah tinggal, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan nilai NJOP sampai dengan Rp 1 Miliar (<http://bprd.jakarta.go.id>). Namun untuk kategori ruko, tempat usaha, maupun apartemen yang memiliki nilai NJOP dibawah Rp. 1 Miliar tetap diwajibkan untuk membayar PBB-P2. Kebijakan pembebasan PBB-P2 ini dibuat dengan tujuan salah satunya untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Provinsi DKI Jakarta terbagi atas lima wilayah kota administrasi yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara serta satu wilayah kabupaten yaitu Kepulauan Seribu. Diantara lima wilayah kota administrasi tersebut, Jakarta Timur memiliki penerimaan PBB-P2 paling

kecil dibandingkan dengan empat wilayah Kota Administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 755 Miliar (<http://timur.jakarta.go.id>). Dengan angka penerimaan PBB-P2 paling kecil tersebut membuat Pemerintah Daerah Jakarta Timur harus terus menggali sumber-sumber PBB-P2 yang potensial dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB-P2.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah jumlah wajib pajak. Wajib pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan/atau bangunan disuatu wilayah. Semakin banyak jumlah wajib pajak PBB-P2 yang memiliki kewajiban membayar PBB maka jumlah PBB yang dibayarkan akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB (Afriyanah dan Waluyo, 2015). Namun pada tahun 2016 terdapat 1,1 juta Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta yang memperoleh penghapusan pajak karena memiliki NJOP di bawah Rp 1 miliar (<http://www.beritajakarta.id>). Dengan adanya sejumlah wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2 tentu akan memberikan pengaruh terhadap menurunnya penerimaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah wajib pajak PBB-P2 di Jakarta Timur pada tahun 2014 berjumlah 483.800 jiwa dimana jumlah tersebut merupakan jumlah wajib pajak paling banyak dibandingkan lima wilayah lain di DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat sebanyak 433.328; Jakarta Selatan 404.252; Jakarta Utara 322.417; Jakarta Pusat 245.764; dan Pulau Seribu 4.696 (<http://megapolitan.kompas.com>).

Namun walaupun memiliki jumlah wajib pajak paling banyak, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki potensi penerimaan PBB-P2 paling kecil dibandingkan empat wilayah kota administrasi lainnya yaitu hanya sebesar Rp 483 Miliar, sementara paling tinggi diperoleh wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp 1.2 Triliun, disusul Jakarta Utara Rp 763 miliar, Jakarta Pusat Rp 664 miliar, dan Jakarta Barat sebanyak Rp 582 miliar (<http://www.beritasatu.com>). Salah satu penyebab rendahnya potensi penerimaan PBB-P2 yaitu dikarenakan banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam membayar PBB-P2.

Tunggakan pajak muncul dikarenakan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2. Tunggakan pajak selalu menjadi kendala bagi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dari dulu hingga saat ini sulit diatasi. Untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2016 memiliki angka tunggakan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 angka tunggakan di Jakarta Timur sebesar Rp. 84.586.119.224, kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 158.447.014.575. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar Rp. 203.876.314.780, dan pada 2016 juga meningkat menjadi Rp. 206.735.094.492. Tingginya angka tunggakan pajak tentu akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2 dimana menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Untuk penelitian yang menguji pengaruh variabel jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB

dilakukan oleh Afriyanah dan Waluyo (2015) dimana penelitian tersebut mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kota Tangerang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novtarisa, dkk (2014) yang mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Pasaman Barat. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Trigiant, dkk (2014) yang mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Padang.

Untuk penelitian yang menguji pengaruh variabel tunggakan pajak terhadap penerimaan PBB masih belum banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suandy (2016) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tunggakan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB di Yogyakarta.

Sebagaimana uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB. Untuk itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait ketidakkonsistenan hasil tersebut. Selain itu masih sedikitnya penggunaan variabel tunggakan pajak pada penelitian sebelumnya, khususnya yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka identifikasi masalah yang berhubungan dengan penerimaan PBB-P2 sebagai berikut:

1. Adanya sejumlah Wajib Pajak di DKI Jakarta yang mendapatkan penghapusan PBB-P2 karena memiliki NJOP di bawah Rp 1 Miliar akan berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan PBB-P2.
2. Jumlah wajib pajak di Jakarta Timur paling banyak dibandingkan dengan lima wilayah lain di DKI Jakarta, namun potensi penerimaan PBB-P2 paling kecil diantara wilayah lain.
3. Pada tahun 2013-2016 angka tunggakan pajak wilayah kota administrasi Jakarta Timur terus meningkat
4. Realisasi penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2015 tidak pernah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya
5. Terdapat penurunan target penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 yang disebabkan adanya kebijakan pembebasan PBB-P2 dengan NJOP dibawah Rp 1 Miliar

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Variabel independen yang diuji yaitu jumlah wajib pajak yang diukur dengan satuan jiwa, dan tunggakan pajak yang diukur dengan satuan Rupiah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan.

2. Variabel dependen yang diuji yaitu penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan dan diukur dengan satuan Rupiah.

D. Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)?
2. Apakah tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)?
3. Apakah jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan PBB-P2?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu untuk memperluas pengetahuan secara teoritis mengenai pengaruh jumlah wajib pajak, dan tunggakan pajak terhadap penerimaan PBB-P2.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak agar dapat mengetahui lebih banyak mengenai PBB-P2. Selain itu agar lebih memahami manfaat dari pajak serta menyadari pentingnya membayar pajak guna pembangunan negara.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan serta dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah referensi ilmu dari berbagai sumber dalam bidang Perpajakan Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Jakarta Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. *Grand Theory*

a. Teori Locke

Menurut Musgrave (1984:460) teori Locke menyatakan bahwa salah satu fungsi dasar suatu negara adalah sebagai pelindung properti bagi warganya, perlindungan ini akan meningkatkan nilai riil tanah dan bangunan oleh sebab itu pemilik properti diwajibkan untuk membayar kepada negara atas pengeluaran negara tersebut.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini negara sebagai pelindung atas properti berupa tanah atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai timbal balik atas perlindungan yang negara berikan, negara menarik pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak yang dikenakan atas properti tersebut bervariasi jenisnya berdasarkan objeknya. Untuk properti berwujud tanah dan bangunan di Indonesia dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut Purwono (2010:23) teori kewajiban pajak mutlak atau disebut juga teori bakti yaitu didasarkan atas paham *Organische Staatsleer* dimana paham ini menyatakan bahwa karena sifat yang

melekat pada suatu negara maka melekat juga hak mutlak bagi negara untuk menarik pajak dari warganya. Dalam pelaksanaannya, negara secara mutlak memiliki kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan keadilan bagi warganya, termasuk juga menarik pajak dari setiap warganya. Selain itu, warga negara juga secara mutlak memiliki kewajiban untuk patuh pada peraturan yang telah ditetapkan negara.

Setiap individu tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu setiap orang perlu menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunjukkan tanda baktinya kepada negara dengan membayar pajak. (Resmi, 2012:6)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori pajak mutlak atau teori bakti menyatakan suatu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak kepada rakyatnya dikarenakan sifat negara itu sendiri. Oleh karena itu negara memiliki hak untuk memungut pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Seluruh wajib pajak harus menyadari bahwa kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mutlak dan harus dilaksanakan sebagai tanda bakti kepada negara.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Diana dan Setiawati (2014:437) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang memiliki sifat objektif yaitu dimana besarnya pajak yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan kondisi objek yaitu tanah dan/atau

bangunan. Keadaan subjek yaitu siapa yang membayar tidak menjadi dasar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.

Menurut Suprianto (2011:101) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sementara menurut Mardiasmo (2016:406) PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh subjek pajak berupa orang pribadi atau Badan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai sejak 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap dipungut oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2016:406).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak dan

dikenakan atas objek pajak berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan perdesaan dan perkotaan.

a. Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:406) objek PBB-P2 adalah berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sementara untuk bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara tetap diatas tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Jalan lingkungan yang berada dalam satu kompleks bangunan yaitu hotel, pabrik, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- 2) Jalan tol;
- 3) Kolam renang;
- 4) Pagar mewah;
- 5) Tempat olahraga;
- 6) Galangan kapal, dermaga;
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

9) Menara

Sedangkan untuk kategori objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah sebagai berikut :

- 1) Digunakan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dimana kegiatan tersebut tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya;
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk objek pajak yang digunakan oleh negara untuk kegiatan pemerintahan, penentuan besarnya pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

b. Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:407) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara mutlak mempunyai hak atas bumi

dan/atau bangunan, memperoleh manfaat atau memiliki dan menguasai atas bumi, dan/atau bangunan.

c. Cara Menghitung PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2016:408), PBB-P2 dihitung dengan cara :

$$\text{PBB-P2} = \text{tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

d. Tarif PBB-P2

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejak PBB dialihkan menjadi Pajak Daerah pada Tahun 2013, tarif PBB di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan NJOP Bumi dan/atau Bangunan dikutip dari Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.16 tahun 2011 tentang PBB-P2 yaitu sebagai berikut :

- 1) 0,01 % : untuk NJOP kurang dari 200 juta
- 2) 0,1 % : untuk NJOP 200 juta s/d kurang dari 2 milyar
- 3) 0,2 % : untuk NJOP 2 milyar s/d kurang dari 10 milyar
- 4) 0,3 % : untuk NJOP 10 milyar atau lebih

e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Mardiasmo (2016:408) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh atas terjadinya transaksi jual beli secara wajar, namun apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan cara perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP

merupakan dasar untuk pengenaan PBB-P2. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu metode untuk menentukan nilai jual suatu objek pajak dengan cara dibandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis serta jaraknya berdekatan, kemudiann juga memiliki manfaat yang sama dan sudah dipastikan harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru, yaitu metode untuk menentukan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, dan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut,
- 3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu metode untuk menentukan nila jual suatu objek pajak berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut.

Nominal NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Namun bagi daerah tertentu yang daerahnya memiliki perkembangan pembangunan yang cukup pesat sehingga menyebabkan kenaikan NJOP yang cukup besar, untuk NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

f. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Mardiasmo (2016:408) besarnya NJOPTKP untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00.

NJOPTKP ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Mekanisme PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2016:409) PBB-P2 dikenakan kepada wajib pajak setiap tahun. PBB yang harus dibayarkan dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang yaitu di daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan atas objek PBB menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek mereka menurut ketentuan Undang-Undang PBB. SPOP harus diisi dengan jelas, dan lengkap. Selain itu juga harus ditanda-tangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT yaitu surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak dimana SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib Pajak

3. Jumlah Wajib Pajak

Menurut Purwono (2010:23), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk juga pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siahaan (2008:56) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan perundang-undangan perpajakan daerah memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu seseorang atau badan dapat disebut sebagai wajib pajak apabila telah ditetapkan pada peraturan daerah untuk membayar pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:407), Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan orang pribadi atau badan yang

memiliki hak atas Bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan manfaat atas Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak merupakan jumlah keseluruhan orang atau badan tertentu yang memiliki tanah dan/atau bangunan dan diwajibkan untuk membayar pajaknya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

4. Tunggakan Pajak

Dalam dunia perpajakan, terdapat sanksi administratif maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dimana hal ini terkait dengan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Oleh sebab itu, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Dalam hal ini, ketidakpatuhan wajib pajak dapat berupa kurang bayar, maupun menunggak dalam membayar pajak.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) tunggakan pajak adalah sejumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak termasuk juga membayar sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Gunadi (2005:249) tunggakan pajak adalah utang pajak yang tidak dibayarkan atau kurang dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo, dan akan berakhir apabila terjadi pencairan tunggakan pajak.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:140), tunggakan pajak adalah utang pajak yang sudah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, dimana merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa.

Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak lalai dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak sehingga timbul tunggakan pajak.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:119) faktor tersebut diantaranya:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak memahami adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut
- b. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah dalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan
- c. Kesalahpahaman (*negligence*) yaitu wajib pajak lupa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan besarnya jumlah pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak beserta denda yang dikenakan atas tunggakan pajak tersebut dimana dalam hal ini yaitu tunggakan PBB-P2.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh dari beberapa jurnal dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afriyanah dan Waluyo (2015) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Namun untuk laju inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan yang dilakukan oleh Afriyanah dan Waluyo (2015) terletak pada lokasi penelitian serta penggunaan variabel independen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur sementara penelitian Afriyanah dan Waluyo (2015) di kota Tangerang. Untuk variabel independen dalam penelitian Afriyanah dan Waluyo (2015) yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah luas lahan, jumlah bangunan dan laju inflasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suandy (2016) menunjukkan bahwa jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Sementara untuk NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri (2016) yaitu pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur sementara penelitian Putri dan Suandy (2016) dilakukan di Yogyakarta. Selain itu penelitian Putri dan Suandy (2016) menggunakan variabel jumlah SPPT dan NJOP, sementara penelitian ini tidak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Makmur (2010) menunjukkan bahwa hanya jumlah wajib pajak sektor perkotaan saja sebagai variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Makmur (2010) adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur sementara penelitian Makmur (2010) di Kutai Barat. Selain itu penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen tunggakan pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Novtarisa, dkk (2014) menunjukkan bahwa PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan investasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Novtarisa, dkk (2014) adalah pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Timur sementara penelitian Novtarisa, dkk (2014) di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu penelitian Novtarisa, dkk (2014) menggunakan variabel independen lain yaitu PDRB per kapita dan investasi, sementara penelitian ini tidak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Trigiant, dkk (2014) menunjukkan bahwa inflasi dan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Sementara untuk jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Trigiant, dkk (2014) adalah pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta Timur sementara penelitian Trigiant, dkk (2014) di kota Padang. Selain itu penelitian Trigiant,

dkk (2014) menggunakan variabel inflasi dan jumlah penduduk sementara penelitian ini tidak menggunakannya dikarenakan keterbatasan jumlah data untuk dijadikan sampel.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2005) menunjukkan bahwa Variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan serta jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan PBB. Sementara untuk variabel krisis moneter berpengaruh negatif terhadap variabel penerimaan PBB. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Sasana (2005) adalah pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur sementara penelitian Sasana (2005) di Banyumas. Selain itu penggunaan variabel PDRB perkapita, inflasi, jumlah luas lahan dan jumlah bangunan yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel II.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul, Jurnal, Pengarang	Hipotesis	Metode	Hasil Penelitian
1	<p>Jurnal: Ultima Accounting Vol 7. No.1. Juni 2015</p> <p>Pengarang: Afriyanah dan Waluyo (2015)</p>	<p>H1 : Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p> <p>H2 : Luas lahan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p> <p>H3 : Jumlah bangunan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p>	<p>Populasi : seluruh penerimaan Kecamatan yang berada di Kota Tangerang yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2010 hingga tahun 2013</p> <p>Sampel : keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : sekunder Sumber data :</p>	<p>H1 : Diterima H2 : Diterima H3 : Diterima H4 : Ditolak H5 : Diterima</p>

		<p>H4 : Laju inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p> <p>H5 : Jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju inflasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<p>data penerimaan PBB dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang</p> <p>Teknik analisis : Analisis linear regresi berganda</p>	
2	<p>Jurnal : e-journal Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta 2016</p> <p>Pengarang : Putri dan Suandy (2016)</p>	<p>H1 : jumlah SPPT berpengaruh terhadap penerimaan PBB</p> <p>H2 : NJOP berpengaruh terhadap penerimaan PBB</p> <p>H3 : tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB</p> <p>H4 : jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB</p>	<p>Populasi : seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Kota Yogyakarta</p> <p>Sampel : Data mengenai jumlah SPPT, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tunggakan pajak, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan</p> <p>Data : Sekunder Sumber data : Data dari Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.</p> <p>Teknik analisis : Analisis linear regresi berganda</p>	<p>H1 : Ditolak</p> <p>H2 : Diterima</p> <p>H3 : Diterima</p> <p>H4 : Diterima</p>
3	<p>Jurnal : Jurnal Eksis Vol.6 No.2, Agustus 2010 ISSN 0216- 6437 www.karyailmiah.polnes.ac.id</p>	<p>H1 : jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan jumlah wajib pajak sektor perdesaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.</p>	<p>Populasi: penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat pada periode 2000-2007</p> <p>Data : sekunder Teknik analisis: Analisis linear regresi berganda</p>	<p>H1 : Diterima</p> <p>H2 : Diterima</p>

	<p>Pengarang : Makmur (2010)</p>	<p>H2 : jumlah wajib pajak sektor perkotaan berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat</p>		
4	<p>Jurnal : Pendidikan Ekonomi Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi</p> <p>Pengarang : Novtarisa, dkk (2014)</p>	<p>H1 : PDRB perkapita mempengaruhi penerimaan PBB</p> <p>H2 : jumlah wajib pajak mempengaruhi penerimaan PBB</p> <p>H3 : investasi mempengaruhi penerimaan PBB</p> <p>H4 : PDRB perkapita, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan dan investasi secara bersama- sama mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan</p>	<p>Populasi : Data penerimaan PBB, PDRB dan investasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>Sampel : Data penerimaan PBB, PDRB dan investasi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007-2011</p> <p>Data : sekunder Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>Teknik analisis : Analisis linear regresi berganda</p>	<p>H1 : Diterima</p> <p>H2 : Diterima</p> <p>H3 : Diterima</p> <p>H4 : Diterima</p>
5	<p>Jurnal : EJournal Universitas Bung Hatta. Vol. 5, No. 1, 2014</p> <p>Pengarang : Trigiant, dkk (2014)</p>	<p>H1 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang</p> <p>H2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang</p>	<p>Populasi : seluruh wajib pajak PBB yang berada di wilayah Kota Padang</p> <p>Sampel : seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kota Padang meliputi sebelas kecamatan yang ada di wilayah Kota Padang mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012</p> <p>Data : sekunder Sumber Data :</p>	<p>H1 : Ditolak</p> <p>H2 : Ditolak</p> <p>H3 : Diterima</p>

		H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang	Data di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Teknik analisis: Analisis linear regresi berganda	
6	Jurnal : Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 2, No. 1, Juli 2005, Hal 19-29. Pengarang : Sasana (2005)	H1 : PDRB per kapita berpengaruh terhadap penerimaan PBB H2 : Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB H3 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB H4 : Jumlah luas lahan berpengaruh terhadap penerimaan PBB H5 : Jumlah luas bangunan berpengaruh terhadap penerimaan PBB H6 : Krisis moneter Berpengaruh Terhadap penerimaan PBB	Populasi : data sekunder tahun anggaran 1986/1987 - 2001/2002. Sampel : data tiap-tiap variabel dalam jangka waktu 16 tahun, yaitu kurun waktu 1986-2001 Data : sekunder Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Teknik analisis : Analisis linear regresi berganda	H1 : Diterima H2 : Diterima H3 : Diterima H4 : Diterima H5 : Diterima H6 : Ditolak

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2017

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak, dan tunggakan pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, variabel yang memiliki hasil konsisten berpengaruh yaitu jumlah wajib pajak. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu yaitu analisis linear regresi berganda. Secara keseluruhan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu yaitu terletak pada sampel lokasi penelitian, periode tahun penelitian, dan beberapa variabel independen yang digunakan.

C. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu jumlah wajib pajak, dan tunggakan pajak serta variabel dependen yaitu penerimaan PBB-P2. Pada teori Locke dikemukakan bahwa salah satu fungsi dasar suatu negara adalah sebagai pelindung properti bagi warganya. Perlindungan yang diberikan negara akan meningkatkan nilai riil tanah dan bangunan. Oleh sebab itu sudah seharusnya apabila dikenakan pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Pajak yang dapat dikenakan pada properti berupa tanah dan/atau bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Negara memungut pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki masyarakat sebagai tanda timbal balik masyarakat atas perlindungan yang telah Negara berikan.

Dalam hal ini, teori Locke dapat didukung oleh teori Bakti yang menyatakan bahwa dikarenakan sifat suatu Negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak oleh Negara kepada rakyatnya. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki kewajiban secara mutlak untuk membayarkan kewajiban pajaknya sebagai bukti baktinya kepada negara serta sebagai timbal balik dari perlindungan atas tanah dan bangunan yang diberikan oleh negara kepadanya sesuai dengan teori Locke.

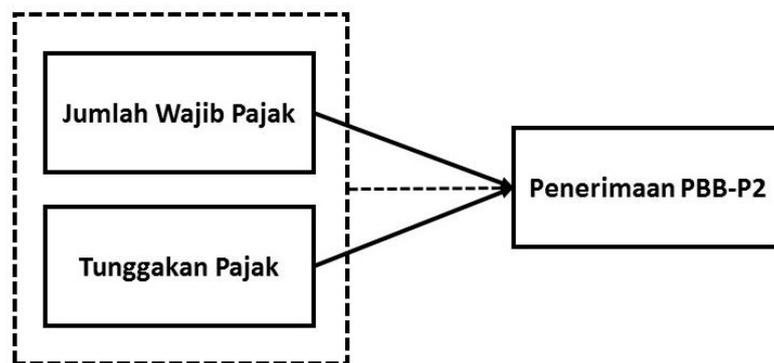
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan (Mardiasmo, 2016:407). Bagi orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan, wajib mendaftarkan objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya. Dengan meningkatnya tanah dan/atau bangunan yang didaftarkan, maka jumlah wajib pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan jumlah PBB yang dibayarkan juga akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB (Afriyannah dan Waluyo, 2015). Menurut Novtarisa, dkk (2014) perubahan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, yaitu berdampak pada kenaikan atau penurunan penerimaan PBB. Menurut Sasana (2005) variabel jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Semakin tinggi nilai variabel tersebut, berarti semakin tinggi juga penerimaan pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Nainggolan dan Wujarso (2004:40) dalam jangka pendek salah satu kendala yang menghalangi optimalisasi penerimaan pajak adalah tingginya angka tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayarkan termasuk didalamnya sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan (Kurniawan dan Pamungkas, 2006:1). Dalam hal ini yaitu tunggakan PBB-P2. Banyak wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya membayar pajak. Menurut Putri

dan Suandy (2016) tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Semakin tinggi angka tunggakan pajak maka akan memberikan dampak pada penerimaan PBB-P2 yang tidak optimal. Usaha tidak membayar pajak menjadi hambatan dalam pemungutan pajak dan perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak (Devano dan Rahayu, 2006:115).

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat digambarkan kerangka teoritik dari penelitian ini dengan bagan sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Teoritik

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2017

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah serta berdasarkan kerangka teoritik yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Siahaan, 2008:56). Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan di suatu wilayah, wajib mendaftarkan objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya. Semakin banyak yang mendaftarkan maka semakin banyak orang pribadi atau badan yang dinyatakan sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan PBB.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dania Novtarisa, dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PBB. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Afriyanah dan Waluyo (2015) juga menunjukkan hasil yang sama dimana jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kota Tangerang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar, maka akan meningkatkan penerimaan PBB P2. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah:

H1 : jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB P2

2. Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2

Banyaknya wajib pajak yang belum menyadari pentingnya membayar PBB-P2 menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Padahal penerimaan PBB-P2 digunakan untuk membangun daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Tunggakan pajak selalu menjadi masalah yang belum memiliki solusi konkrit hingga membuat wajib pajak

jera. Tunggakan pajak merupakan besarnya jumlah pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak beserta denda yang dikenakan atas tunggakan pajak tersebut dimana dalam hal ini yaitu tunggakan PBB-P2. Jika angka tunggakan pajak besar, maka akan berdampak pada berkurangnya realisasi penerimaan PBB-P2. Penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suandy (2016) yang menyatakan tunggakan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB di Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya tunggakan pajak akan mempengaruhi realisasi penerimaan PBB. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah:

H2 : tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2

3. **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PBB-P2**

Jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur maka akan berpengaruh terhadap meningkat dan menurunnya penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan akan menyebabkan jumlah PBB yang dibayarkan juga meningkat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB (Afriyanah dan Waluyo, 2015). Tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB (Putri dan Suandy, 2016). Semakin tinggi angka tunggakan pajak maka akan memberikan dampak pada

penerimaan PBB-P2 yang tidak optimal. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah:

H3 : jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur” adalah data sekunder berupa data jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu data Jumlah Wajib Pajak, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Kota administrasi Jakarta Timur terdiri atas 10 kecamatan, maka jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak 40.

Daftar nama kecamatan di wilayah kota administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Daftar Nama Kecamatan di Jakarta Timur

No.	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Pulo Gadung
2	Kecamatan Matraman
3	Kecamatan Jatinegara
4	Kecamatan Duren Sawit
5	Kecamatan Kramat Jati
6	Kecamatan Makasar
7	Kecamatan Ciracas
8	Kecamatan Pasar Rebo
9	Kecamatan Cipayung
10	Kecamatan Cakung

Sumber : <http://timur.jakarta.go.id> (data diolah oleh penulis)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menggunakan angka baik dalam mengumpulkan, mengolah serta melakukan analisis data. Menurut Sugiyono (2011:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak tertentu dalam bentuk tabel atau diagram (Umar, 2009:42). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan jenis data gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dengan data seksi silang (*cross section*). Karakteristik data panel adalah terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk memperoleh data jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Data ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak sebagai variabel independen serta penerimaan PBB-P2 sebagai variabel dependen. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang biasa disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi, 2013:50). Dalam penelitian ini variabel dependen yang diuji adalah penerimaan PBB-P2.

Variabel penerimaan PBB-P2 dapat dinyatakan dalam bentuk definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

1) Definisi Konseptual

Menurut Mardiasmo (2016:406) PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh subjek pajak berupa orang pribadi atau Badan, kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2) Definisi Operasional

Data penerimaan PBB-P2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan dan diukur dengan satuan Rupiah. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sanusi, 2013:50). Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang terdiri atas jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak. Berikut merupakan penjelasan dari seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional, yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah Wajib Pajak

1) Definisi Konseptual

Menurut Mardiasmo (2016:407), Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas Bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan manfaat atas Bangunan.

2) Definisi Operasional

Data jumlah wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan dan diukur dengan satuan orang/jiwa. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

b. Tunggakan Pajak

1) Definisi Konseptual

Tunggakan pajak adalah sejumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak termasuk juga membayar sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan (Kurniawan dan Pamungkas, 2006:1).

2) Definisi Operasional

Data tunggakan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan, dan diukur dengan satuan Rupiah. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Metode analisis data dilakukan dengan bantuan program teknologi komputer yaitu program aplikasi SPSS versi 24. Berikut penjelasan secara rinci mengenai teknik analisis data tersebut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011:29). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:53) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Menurut Ghozali (2013:154) terdapat dua cara untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

1) Analisis Grafik

Salah satu cara untuk menguji normalitas yaitu dengan analisis grafik histogram dan *Normal P-Plot*. Namun analisis grafik memiliki kelemahan yaitu hasilnya tidak dapat dipastikan kebenarannya terutama apabila jumlah sampel dalam penelitian kecil. Untuk histogram, apabila grafik histogram menggambarkan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tepat ditengah seperti bentuk lonceng maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk *Normal P-Plot*, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar dalam melihat hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

- a) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

b) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

2) Uji Statistik

Selain melakukan uji normalitas dengan analisis grafik, disarankan juga untuk menguji dengan uji statistik. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan yaitu uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Dasar dalam melihat hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* yaitu apabila hasil signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tersebut tidak normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Utomo (2009:161) masalah multikolonieritas muncul jika terdapat hubungan yang pasti di antara satu atau lebih variabel independen dalam penelitian. Multikolonieritas adalah korelasi yang sangat tinggi yang terjadi pada hubungan diantara variabel independen. Apabila jumlah variabel independen dalam suatu penelitian lebih dari satu maka peneliti perlu melakukan uji multikolonieritas. Metode yang paling sering digunakan untuk menguji adanya gejala multikolonieritas yaitu dengan cara dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *tolerance* karena cara tersebut dinilai paling mudah. Apabila nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terdapat gejala

multikolonieritas. Namun apabila nilai $VIF > 10$ atau nilai tolerance $< 0,10$ maka diantara variabel bebas penelitian tersebut terdapat gejala multikolonieritas. (Julianita dan Sarjono, 2011:74)

c. Uji Autokorelasi

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:80) autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi lebih sering timbul pada data yang bersifat runtut waktu. Untuk data *cross section* sangat jarang terjadi sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan uji tersebut.

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji Run Test. Menurut Ghozali (2013:116) Run test dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dinyatakan bahwa residual adalah acak atau random. Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Uji run test merupakan metode untuk menunjukkan hasil yang lebih pasti apabila terjadi masalah pada hasil uji Durbin Watson Test. Masalah tersebut yaitu apabila hasil uji berada pada bagian “tidak dapat

disimpulkan” atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan uji Durbin Watson.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:134) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Namun apabila terjadi perbedaan dapat disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homokedastisitas.

Terdapat beberapa cara untuk dapat mendeteksi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini yaitu Grafik Plot dan Uji White.

1) Grafik Plot

Untuk uji grafik yaitu menggunakan *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam hasil uji tersebut membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Namun apabila tidak membentuk pola yang jelas, kemudian titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas atau dapat disebut juga homokedastisitas. (Ghozali, 2013:136)

2) Uji White

Uji White dilakukan dengan cara meregres residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat, dan perkalian antar variabel independen (Ghozali, 2013:138). Dalam uji White hasil yang diperoleh adalah R square (R^2) untuk menghitung c^2 , dimana $c^2 = n \times R^2$. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c^2 hitung $< c^2$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. Untuk melihat c^2 tabel menggunakan tabel chi square dengan df (*degree of freedom*) adalah banyaknya variabel independen dalam regresi auxiliary dan tingkat signifikansi 0,05 (Utomo, 2007:183).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:91) analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Apabila dalam suatu penelitian hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen maka disebut analisis regresi sederhana. Apabila terdapat beberapa variabel independen maka analisisnya disebut dengan analisis regresi berganda.

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Penerimaan PBB-P2 (rupiah)

X1 : Jumlah wajib pajak (jiwa)

X2 : Tunggakan pajak (rupiah)

α : konstanta

e : error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Pengujian hipotesis dalam regresi berganda dapat dilakukan dengan uji signifikansi. Analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara parsial adalah statistik uji t (Firdaus, 2011:146). Taraf signifikansi yang digunakan bisa 0,05 ataupun 0,01. Tetapi dalam ilmu sosial, taraf signifikansi 0,05 sudah cukup. Tujuan dari uji regresi parsial untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila taraf signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan ada pengaruh yang kuat antara variabel dependen dengan variabel independen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Firdaus (2011:147) pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan analisis varian. Analisis varian dalam regresi berganda pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi.

Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh sekelompok variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik uji F. Kriteria yang digunakan adalah apabila ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau ($\alpha < 0,05$) maka variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam hal hubungan tiga variabel atau lebih, ingin diketahui berapa besarnya persentase sumbangan masing-masing variabel X terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama. Besarnya persentase sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda dengan symbol R^2 (Firdaus, 2011:130). Koefisien determinasi R^2 merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel sesuai dengan datanya. R^2 menggambarkan persentase jumlah variasi yang benar-benar dapat dijelaskan oleh garis regresi linearnya (Firdaus, 2011:91).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan sampel data jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 10 kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tahunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Oleh karena itu jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40. Data jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2 wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

1. Statistik Deskriptif

Tujuan dari ditampilkannya statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data variabel-variabel dalam penelitian yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean (nilai rata-rata), dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan penerimaan PBB-P2.

Nilai minimum merupakan nilai terkecil dalam suatu penelitian, sementara nilai maksimum merupakan nilai terbesar dalam suatu penelitian. Mean adalah rata-rata nilai dalam suatu penelitian, dan standar deviasi merupakan ukuran penyimpangan data. Untuk hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.1 :

Tabel IV.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
WP	40	10.23	11.38	10.7608	.34118
TP	40	21.44	25.01	23.2232	.77947
PPBB	40	23.49	26.20	24.6764	.63046
Valid N (listwise)	40				

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa data yang di uji dalam penelitian ini berjumlah 40 sampel, untuk hasil statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki nilai minimum sebesar 23,49 atau sama dengan Rp. 15.908.843.720 yaitu terjadi pada tahun 2013 di Kecamatan Matraman. Sementara untuk nilai maksimum penerimaan PBB-P2 sebesar 26,20 atau sama dengan Rp. 240.157.604.200 yaitu terjadi pada tahun 2016 di Kecamatan Cakung. Kecamatan Matraman menempati nilai minimum dan kecamatan Cakung menempati nilai maksimum dikarenakan dilihat dari jumlah wajib pajak memang paling banyak berada di Kecamatan Cakung dan paling sedikit di Kecamatan Matraman. Sementara itu untuk nilai rata-rata (mean) penerimaan PBB-P2 sebesar 24,67 atau sama dengan Rp. 64.328.758.610 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,63.
- 2) Jumlah wajib pajak`di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki nilai minimum sebesar 10,23 atau sama dengan 27.710 jiwa yaitu terjadi pada tahun 2013 di Kecamatan Matraman. Sementara nilai maksimum

jumlah wajib pajak sebesar 11,38 atau sama dengan 87.958 jiwa yaitu terjadi pada tahun 2016 di Kecamatan Cakung. Kecamatan Matraman menempati nilai minimum dan Kecamatan Cakung menempati nilai maksimum dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk untuk kecamatan Matraman memiliki jumlah yang paling rendah diantara kecamatan lain di Jakarta Timur, begitu juga dengan kecamatan Cakung yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi diantara kecamatan lain. Jumlah wajib pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 10,76 atau sama dengan 49.896,05 jiwa dan nilai standar deviasinya sebesar 0,34.

- 3) Tunggakan pajak di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki nilai minimum sebesar 21,44 atau sama dengan Rp. 2.055.641.896 yaitu pada tahun 2013 di Kecamatan Matraman. Sementara nilai maksimum tunggakan pajak yaitu sebesar 25,01 atau sama dengan Rp. 72.987.351.080 yang terjadi pada tahun 2016 di Kecamatan Cakung. Kecamatan Matraman menempati nilai minimum dan kecamatan Cakung menempati nilai maksimum karena dapat dilihat dari jumlah wajib pajak dan penerimaan PBB-P2, kecamatan Matraman menempati posisi paling rendah dibandingkan wilayah lain dan kecamatan Cakung menempati posisi paling tinggi sehingga angka tunggakan pajaknya juga menyesuaikan. Sedangkan nilai rata-rata (mean) untuk tunggakan pajak sebesar 23,22 atau sama dengan Rp. 16.341.113.580 dan standar deviasinya sebesar 0,78.

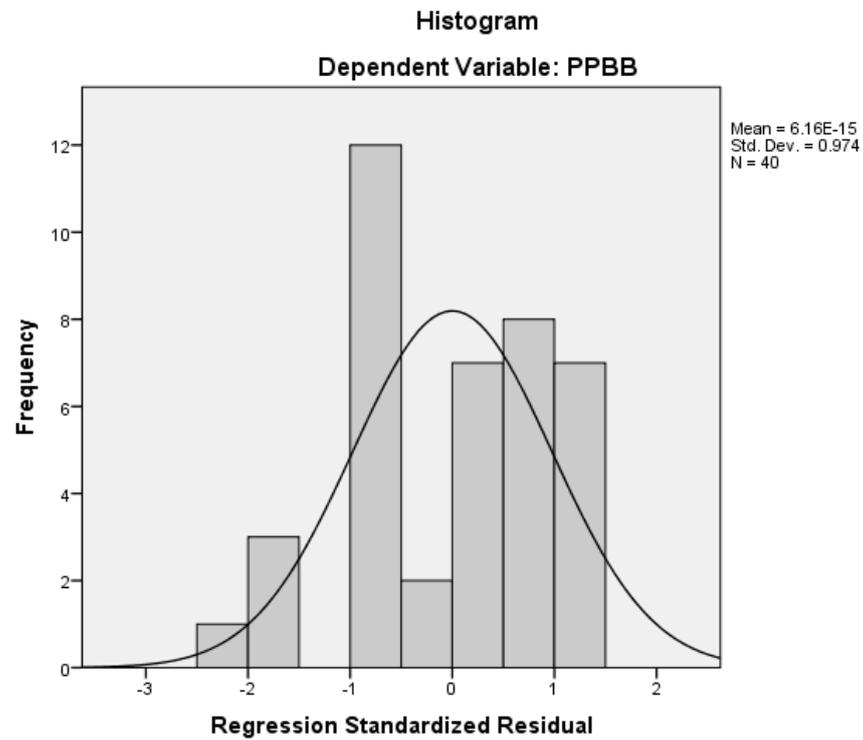
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan dua cara untuk mendeteksi apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu dengan uji grafik dan uji statistik. Uji grafik terdiri atas uji *Normal P-Plot* dan histogram, sementara uji statistik menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

1) Uji Grafik

Salah satu cara untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji grafik dengan cara uji *Normal P-Plot* dan histogram. Berikut adalah penjelasan hasil dari grafik uji normalitas dalam penelitian ini :

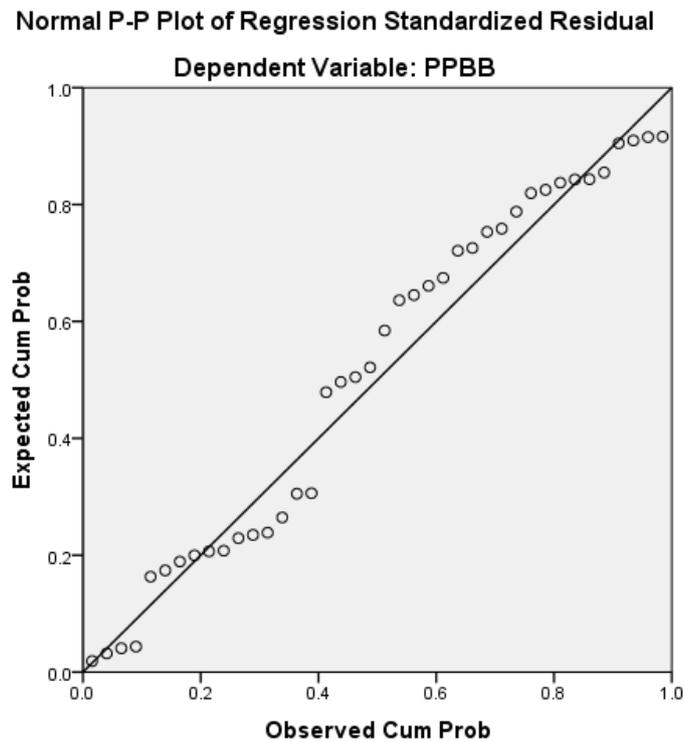


Gambar IV.1

Grafik Histogram

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Dapat dilihat pada Gambar IV.1 Grafik Histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tepat ditengah menyerupai bentuk lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar IV.2

Grafik *Normal P-Plot*

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Pada Gambar IV.2 Grafik *Normal P-Plot* diatas dapat dilihat bahwa pola penyebarannya yaitu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka hal tersebut menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dinyatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Statistik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila hasil signifikansi lebih

besar dari 0,05 atau 5%. Apabila hasil signifikansi di bawah 0,05 atau 5% maka menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tidak normal. Berikut adalah hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel IV.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35321950
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.099
	Negative	-.115
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 tau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi yang sangat tinggi pada hubungan diantara variabel independen dalam penelitian. Pada penelitian ini untuk menguji multikolonieritas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,10$ maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Namun apabila nilai $VIF > 10$ atau nilai $tolerance < 0,10$ maka diantara variabel bebas penelitian tersebut

terdapat gejala multikolonieritas. Berikut penjelasan hasil uji multikolonieritas :

Tabel IV.3
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 yaitu sebesar 0,299 untuk variabel jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak. Selain itu juga nilai VIF menunjukkan < 10 yaitu sebesar 3,347 untuk variabel jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Berikut adalah penjelasan hasil uji autokorelasi :

Tabel IV.4
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04838
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	16
Z	-1.442
Asymp. Sig. (2-tailed)	.149

a. Median

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.4 Uji Autokorelasi dapat dilihat bahwa diperoleh Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,149. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,149 > dari 0,05.

d. Uji Heteroskedastisitas

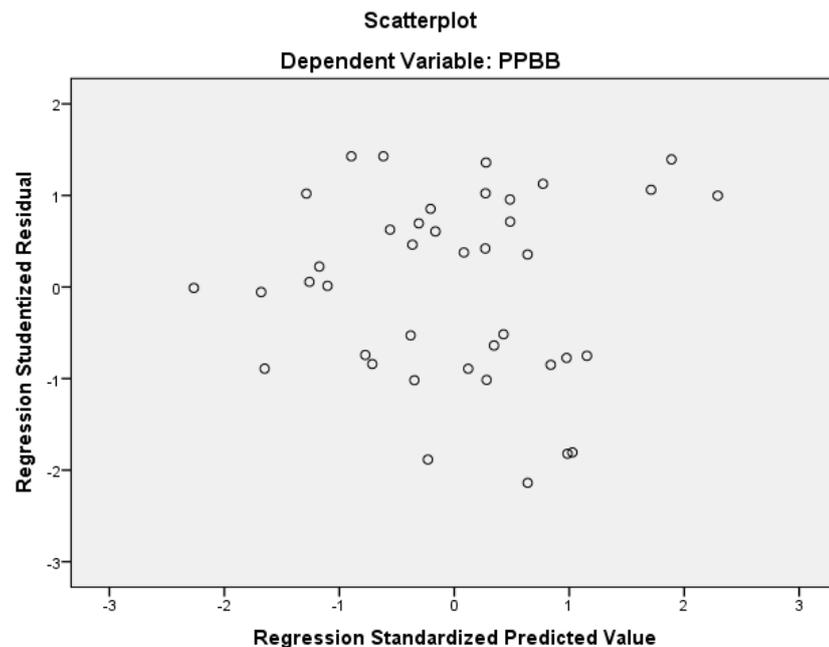
Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Namun apabila terjadi perbedaan dapat disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homokedastisitas.

Dalam mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya yaitu Uji Grafik dan Uji Statistik. Dalam penelitian ini uji Grafik dilakukan

dengan menggunakan grafik *scatterplot* sementara untuk uji statistic menggunakan uji White. Berikut penjelasan hasil dari masing-masing uji yang telah dilakukan

1) Grafik Plot

Untuk *scatterplot* apabila titik-titik dalam hasil uji tersebut membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Namun apabila tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas. Berikut hasil dari grafik *scatterplot* :



Gambar IV.3

Uji Heteroskedastisitas-Scatterplot

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Gambar IV.3 Uji Heterokedastisitas-Scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya gejala heterokedastisitas.

2) Uji White

Dalam uji White hasil yang diperoleh adalah R square (R^2) untuk menghitung c^2 , dimana $c^2 = n \times R^2$. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c^2 hitung $< c^2$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. Berikut hasil dari uji White :

Tabel IV.5

Uji White

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 ^a	.249	.139	.12234

a. Predictors: (Constant), WPTP, WP, TP, TPkuadrat, WPkuadrat

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil regresi residual kuadrat yang ditunjukkan oleh tabel IV.5, menunjukkan hasil R square sebesar 0,249. Dalam uji White hasil yang diperoleh adalah R square (R^2) untuk menghitung c^2 , dimana $c^2 = n \times R^2 = 0,249 \times 40 = 9,96$. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c^2 hitung $< c^2$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. Untuk melihat c^2 tabel dengan df (*degree of freedom*)

adalah banyaknya variabel independen dalam regresi auxiliary dan tingkat signifikansi 0,05 (Utomo, 2007:183). Dalam penelitian ini jumlah variabel dalam regresi auxiliary ada 5 variabel, maka nilai c^2 tabel adalah 11,07. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini $9,96 < 11,07$ (c^2 hitung $< c^2$ tabel). Maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Apabila variabel-variabel pada penelitian ini telah terbebas dari masalah uji asumsi klasik, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan PBB-P2 sebagai variabel dependen. Berikut hasil dari analisis regresi linier berganda :

Tabel IV.6
Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel IV.6, maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut :

$$\text{PBB-P2} = 8,960 + 0,072 \text{ WP} + 0,643 \text{ TP} + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PBB-P2

WP = Jumlah wajib pajak

TP = Tunggakan pajak

e = error

Berdasarkan persamaan regresi pada Tabel IV.6 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstantan positif sebesar 8,960 artinya apabila semua variabel independen yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak bernilai konstan atau 0, maka penerimaan PBB-P2 akan mengalami kenaikan sebesar 8,960.
- b. Nilai koefisien regresi variabel jumlah wajib pajak positif sebesar 0,072 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel jumlah wajib pajak mengalami kenaikan sebanyak 1 jiwa maka variabel penerimaan PBB-P2 akan mengalami kenaikan sebesar 0,072.
- c. Nilai koefisien regresi variabel tunggakan pajak positif sebesar 0,643 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel penerimaan PBB-P2 akan mengalami kenaikan sebesar 0,643.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Tujuan dari uji t dalam penelitian untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila taraf signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan ada pengaruh yang kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah tabel hasil uji t dalam penelitian:

Tabel IV.7

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.7 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Berikut penjelasan atas hasil pengujian masing-masing hipotesis :

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota

Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa variabel jumlah wajib pajak memiliki t_{hitung} sebesar 0,233 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($2,02619 > 0,233$) dan nilai signifikan variabel $0,817 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa tunggakan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 4,720. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,02619 < 4,720$) dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yaitu tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Uji f

Uji f bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh sekelompok variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah apabila ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau ($\alpha < 0,05$) maka variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan derajat kepercayaan 5%, df 1 (jumlah variabel-

1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau $40-2-1 = 37$ (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,25. Berikut tabel hasil uji f dalam penelitian ini :

Tabel IV.8

Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.636	2	5.318	40.439	.000 ^b
	Residual	4.866	37	.132		
	Total	15.502	39			

a. Dependent Variable: PPBB

b. Predictors: (Constant), TP, WP

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PBB-P2. Hal ini dapat diketahui dari nilai ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$) yaitu $40,439 > 3,25$ dan signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel independen yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka menunjukkan bahwa semua variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan

untuk memprediksi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi :

Tabel IV.9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.669	.36264	1.517

a. Predictors: (Constant), TP, WP

b. Dependent Variable: PPBB

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.9 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,669 atau 66,9 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 66,9 % dari penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak. Sementara 33,1 % lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak memiliki $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($2,02619 > 0,233$) dan nilai signifikan variabel $0,817 > 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2, karena bagi orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib mendaftarkan objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya. Dengan meningkatnya tanah dan/atau bangunan yang didaftarkan, maka jumlah wajib pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan akan semakin meningkat, dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan PBB (Afriyannah dan Waluyo, 2015)

Dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan dapat dilihat pada data penelitian untuk variabel penerimaan PBB-P2 dari total 10 kecamatan di Jakarta Timur yang dijadikan sampel, terdapat 7 kecamatan pada tahun 2016 yang mengalami penurunan penerimaan PBB-P2 yaitu kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, dan Matraman. Sementara untuk 7 kecamatan tersebut di tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak. Sebagai contoh kecamatan Pasar Rebo mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 298 jiwa, sementara penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.067.550.096. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak mengalami kenaikan namun angka penerimaan PBB-P2 tidak juga

mengalami kenaikan. Selain itu pada tahun 2014 jumlah wajib pajak di Kecamatan Duren Sawit mengalami penurunan sebesar 17 jiwa, namun penerimaan PBB-P2 tetap meningkat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang meningkat atau menurun tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan walaupun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan. Dalam dunia perpajakan, terdapat sanksi administratif maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dimana hal ini terkait dengan kepatuhan perpajakan. Masih banyak wajib pajak PBB-P2 yang belum menyadari pentingnya untuk membayar PBB-P2.

Faktor lainnya yang membuat penerimaan PBB-P2 menurun yaitu di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 dikeluarkan kebijakan penghapusan PBB-P2 untuk NJOP dibawah Rp. 1 Milyar berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas rumah tinggal, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan nilai NJOP sampai dengan Rp 1 Miliar (<http://bprd.jakarta.go.id>). Dengan adanya peraturan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta salah

satunya yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur. Jumlah wajib pajak dapat bertambah dengan adanya orang pribadi atau badan yang baru dinyatakan sebagai wajib pajak PBB-P2. Namun apabila wajib pajak tersebut memiliki objek pajak dengan NJOP dibawah 1 Milyar untuk rumah tinggal, rumah susun sewa dan rumah susun milik maka wajib pajak tersebut akan tetap menerima SPPT namun besarnya pajak yang harus dibayarkan nihil. Sehingga walaupun jumlah wajib pajak naik, namun penerimaan PBB-P2 tidak mengalami kenaikan karena adanya peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trigiant, dkk (2014) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 ditolak.

2. Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa tunggakan pajak memiliki signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,02619 < 4,720$) dan signifikansi sebesar 0,000 sehingga H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur karena apabila tunggakan pajak semakin meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan kewajibannya, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak termasuk didalamnya sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, angka tunggakan pajak hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar PBB-P2. Namun untuk angka penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

Penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat walaupun angka tunggakan pajak juga terus meningkat disebabkan karena adanya peraturan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Provinsi DKI Jakarta yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur No 175 Tahun 2013. Kenaikan NJOP di Jakarta disebabkan karena sejak tahun 2010 yang lalu NJOP belum pernah mengalami kenaikan, padahal harga tanah di Jakarta terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu kebijakan kenaikan NJOP ini diterapkan untuk menyesuaikan kenaikan harga tanah dan bangunan di Jakarta yang selalu berubah setiap tahunnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan walaupun masih banyak wajib pajak di Kota Administrasi Jakarta Timur yang menunggak

dalam membayar PBB-P2, namun penerimaan PBB-P2 tetap mengalami kenaikan karena adanya peraturan kenaikan NJOP tersebut. Dengan adanya kenaikan NJOP tersebut maka besarnya PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga akan meningkat. Semakin besarnya jumlah PBB-P2 yang dibayarkan oleh wajib pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suandy (2016) yang menyatakan bahwa tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Dengan demikian Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 diterima.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan PBB-P2

Hasil pengujian statistik berdasarkan uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini dapat diketahui dari nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) yaitu $40,439 > 3,25$ dan signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel independen yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi

Jakarta Timur. Hasil pengujian statistik ini mendukung hipotesis yang sebelumnya diajukan peneliti.

Dari tabel IV.9 dapat terlihat hasil *adjusted R²* dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,669. Hal ini berarti bahwa 66,9 % dari penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak. Dengan demikian Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 diterima.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data tahunan yaitu tahun 2013-2016, maka jumlah data dalam penelitian ini adalah 40. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Walaupun jumlah wajib pajak mengalami kenaikan atau penurunan tidak dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Semakin meningkatnya tunggakan pajak maka menunjukkan semakin banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2.
3. Jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa implikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan baru di Provinsi DKI Jakarta yaitu penghapusan PBB-P2 untuk NJOP dibawah 1 Milyar. Selain itu juga disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar PBB-P2. Sehingga walaupun jumlah wajib pajak mengalami kenaikan atau penurunan, namun tidak mempengaruhi penerimaan PBB-P2.
2. Tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menunggak maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2. Banyaknya wajib pajak yang menunggak diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu peraturan kenaikan NJOP membuat beberapa wajib pajak merasa keberatan sehingga tidak memenuhi kewajibannya.
3. Secara bersama-sama jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan, untuk memperhatikan kedua faktor tersebut yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian yaitu dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar memberikan hasil yang lebih akurat
2. Penelitian ini menggunakan sampel hanya wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel yaitu tidak hanya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tetapi bisa menggunakan wilayah lain di seluruh Indonesia agar dapat lebih mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan PBB-P2 di Indonesia.
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak dan tunggakan pajak berpengaruh sebesar 66,9% terhadap penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain tersebut, seperti misalnya PDRB, Inflasi, atau faktor-faktor lainnya di bidang perpajakan.
4. Untuk pihak Pemerintah Daerah khususnya pihak kantor pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak melalui program-program tertentu seperti sosialisasi mengenai PBB-P2 agar mereka mau menjalankan kewajibannya sehingga penerimaan PBB-P2 juga akan meningkat

5. Untuk pihak Pemerintah Daerah khususnya pihak kantor pajak diharapkan dapat melakukan peningkatan dan penegakan sanksi bagi para wajib pajak yang menunggak agar mereka merasa jera dan tidak lagi menunggak dalam membayar PBB-P2, sehingga angka tunggakan pajak tidak terus meningkat dan penerimaan PBB-P2 dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanah, & Waluyo. (2015). "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan". *Ultima Accounting Vol 7. No.1*, Juni.
- APBD 2016. <http://apbd.jakarta.go.id/pub/2016/6/1>. (Diakses pada 7 Juni 2017)
- Dania, Ansofino, & Yola. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman Barat". *Pendidikan Ekonomi Vol 1, No 1*.
- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. (2006). **Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu**. Jakarta: Kencana.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. (2014). **Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini**. Yogyakarta : ANDI.
- Putri, Elisabeth Tilana Mutiara dan Erly Suandy (2016). "Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Yogyakarta". *E-Journal Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya*.
- Firdaus, Muhammad. (2011). **Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. (2013). **Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi M, Djoned. 2005. **Administrasi Pajak**. Jakarta : LPKPAP BPPK
- Jatuh Tempo PBB-P2 31 Agustus 2016. <http://bprd.jakarta.go.id/jatuh-tempo-pbb-p2-31-agustus-2016/> (Diakses pada 24 April 2017)
- Kurniawan, Panca & Bagus. (2006). **Penagihan Pajak**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Makmur. (2010). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB Di Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal Eksis Vol.6 No.2*.
- Mardiasmo. (2016). **Perpajakan**. Yogyakarta: ANDI.
- Meningkat, Penerimaan PBB di Jakarta Timur. <http://poskotanews.com/2014/02/28/meningkat-penerimaan-pbb-di-jakarta-timur/> (Diakses pada 24 April 2017)
- Musgrave, Richard A, & Musgrave, Peggy B. (1984). **Public Finance In Theory and Practice**. United States of America: Mc-Graw Hill Book Company.
- Nainggolan, Pahala dan Riyanto Wujarso. (2004). **Perpajakan untuk yayasan dan lembaga nirlaba sejenis**. Jakarta: PPM.

- Nurmantu, Safri. (2005). **Pengantar Perpajakan**. Jakarta: Granit.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2014). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Purwono, H. (2010). **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**. Erlangga.
- Penerimaan Pajak di DKI Tak Mencapai Target. <http://megapolitan.kompas.com/read/Penerimaan.Pajak.di.DKI.Tak.Mencapai.Target> (Diakses pada 24 April 2017)
- Realisasi Penerimaan PBB DKI Capai 87 Persen. <http://www.beritasatu.com/aktualitas/143445-realisasi-penerimaan-pbb-dki-capai-87-persen.html> (Diakses pada 24 April 2017)
- Resmi, Siti. (2012). **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. (2013). **Metodologi Penelitian Bisnis**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. (2011). **SPSS vs LISREL**. Jakarta : Salemba Empat.
- Sasana, H. (Juli 2005). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Dinamika Pembangunan Vol.2 No.1*.
- Siahaan, Marihot P. (2008). **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. (2011). **Statistika untuk penelitian**. Bandung: Alfabeta CV.
- Suprianto, Edy. (2011). **Perpajakan di Indonesia**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Target Penerimaan PBB P2 di Jaktim tahun 2016 sebesar Rp 755 Milyar. <http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=berita&id=target-penerimaan-pbb-p2-di-jaktim-tahun-2016-sebesar-rp-755-milyar> (Diakses pada 24 April 2017)
- Trigiant, Jefry, Ethika, & Rifa, D. (2014). "Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang". *E-Journal Universitas Bung Hatta. Vol. 5, No. 1*.
- Umar, Husein. (2009). **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Utomo, Yuni Prihadi. (2007). **Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS**. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

1,1 Juta Wajib Pajak di DKI Bebas PBB P2. <http://www.beritajakarta.id/read/11-juta-wajib-pajak-di-dki-bebas-pbb-p2>. (Diakses pada 8 Mei 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :**Surat Permohonan Izin Penelitian untuk BPRD Prov. DKI Jakarta**


*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2474/UN39.12/KM/2017 5 Mei 2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. Dr. Sumarno No.1 Pulogebang
Jakarta Timur

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Della Victorya
Nomor Registrasi : 8335132379
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085710268468

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Administrasi Jakarta Timur"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

LAMPIRAN 2 :

Surat Pengantar dari Unit PTSP Jakarta Pusat untuk BPRD



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 205/16.1/31.71/-1.862.9/e/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI RATU MULYANTI
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : DELLA VICTORYA
NIK : 3175026912940001
Alamat : Jalan Balap Sepeda VII No. 14 RT/RW. 013/001 KEL. JATI KEC. PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta

Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi / Lembaga : Universitas Negeri Jakarta
Alamat Instansi / Lembaga : Jalan Rawamangun Muka KEL. RAWAMANGUN KEC. PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta

Untuk melaksanakan survey/penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak, dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Administrasi Jakarta Timur

Instansi/Lembaga Lokasi Penelitian : Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

Bidang Penelitian : Perpajakan

Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 29 Mei 2017

b. Berakhir : 29 Juni 2017

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan/Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal Penerbitan: 29 Mei 2017



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
SRI RATU MULYANTI
196609111994032006
KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

LAMPIRAN 3 :**Surat Permohonan Izin Penelitian kepada BPRD Provinsi DKI Jakarta**

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jaian Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : 2472/UN39.12/KM/2017 5 Mei 2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi
Daerah (BPRD) Prov. DKI Jakarta
Up. Subbag Kepegawaian
Jl. Abdul Muis No.66
Jakarta Pusat

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Della Victorya
Nomor Registrasi : 8335132379
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085710268468

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Administrasi Jakarta Timur"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat


Woro Sasmitoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

LAMPIRAN 4 :**Surat Izin Riset dan Penelitian dari BPRD Provinsi DKI Jakarta**

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. 3865583 Pes 5371 JAKARTA PUSAT	

Nomor	: 515 /-082.7	30 Mei 2017
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Pemberitahuan izin riset dan penelitian	

Kepada

Yth. 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
2. Kepala Bidang Pengendalian
3. Kepala Bidang Peraturan
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm. Jakarta Timur
5. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
6. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm. Jakarta Timur

di
Jakarta

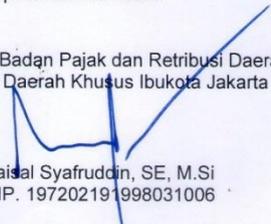
Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta No. 2472/UN39.12/KM/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal permohonan riset dan penelitian, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: Della Victorya
Program	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Jakarta
Judul Penelitian	: Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 Kota Adm. Jakarta Timur

Pada prinsipnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian dengan ketentuan mentaati aturan yang berlaku, adapun waktu pelaksanaan dimulai tanggal 31 Mei s.d 30 Juni 2017. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Faizal Syafruddin, SE, M.Si
NIP. 197202191998031006

Tembusan :
Universitas Negeri Jakarta

CATATAN :
Kepada Mahasiswa yang bersangkutan agar menyerahkan 1(satu) buku skripsi/penelitiannya kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

LAMPIRAN 5 :**Data Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y)**

TAHUN	KECAMATAN	x1_JUMLAH WP	x2_TUNGGAKAN	y_PENERIMAAN
2013	PASAR REBO	33,092	3,321,840,251	16,219,349,986
2013	CIRACAS	47,299	6,494,919,974	26,870,635,212
2013	CIPAYUNG	48,028	10,090,672,109	23,594,465,921
2013	KRAMAT JATI	51,422	7,664,467,482	48,371,719,421
2013	MAKASAR	30,853	4,497,457,469	38,029,446,106
2013	JATINEGARA	47,813	4,966,788,398	29,414,053,580
2013	DUREN SAWIT	75,116	14,529,598,641	42,943,126,499
2013	MATRAMAN	27,710	2,055,641,896	15,908,843,722
2013	PULO GADUNG	45,779	9,513,157,993	56,844,218,327
2013	CAKUNG	80,681	21,451,575,011	114,377,074,230
2014	PASAR REBO	33,322	7,098,687,208	26,677,694,309
2014	CIRACAS	48,042	13,412,685,769	40,321,263,965
2014	CIPAYUNG	48,546	20,395,805,034	34,216,262,771
2014	KRAMAT JATI	51,939	14,998,406,672	69,712,951,230
2014	MAKASAR	30,978	6,172,493,098	53,826,606,562
2014	JATINEGARA	47,996	9,046,940,103	50,759,906,951
2014	DUREN SAWIT	75,099	22,850,798,857	60,110,978,067
2014	MATRAMAN	27,751	3,305,785,182	21,256,775,402
2014	PULO GADUNG	47,665	15,169,022,302	86,536,222,682
2014	CAKUNG	81,364	45,996,390,350	183,502,124,935
2015	PASAR REBO	33,524	9,301,712,327	35,524,586,169
2015	CIRACAS	48,926	17,176,931,342	54,220,701,683
2015	CIPAYUNG	49,379	27,913,229,383	47,910,108,945
2015	KRAMAT JATI	52,522	20,196,998,219	82,475,954,422
2015	MAKASAR	31,334	10,788,523,561	62,507,390,010
2015	JATINEGARA	48,403	12,995,786,590	62,279,211,565
2015	DUREN SAWIT	75,400	29,468,477,557	73,195,544,132
2015	MATRAMAN	27,836	4,983,538,999	30,491,816,561
2015	PULO GADUNG	47,933	18,021,466,142	94,200,028,148

2015	CAKUNG	82,383	53,029,650,660	224,669,341,575
2016	PASAR REBO	33,822	9,544,602,521	30,457,036,073
2016	CIRACAS	50,265	16,013,328,696	49,673,330,326
2016	CIPAYUNG	51,016	26,857,265,931	46,317,107,537
2016	KRAMAT JATI	53,186	17,834,272,695	86,644,950,816
2016	MAKASAR	31,801	7,717,272,636	62,170,306,905
2016	JATINEGARA	56,804	10,440,952,928	59,137,093,283
2016	DUREN SAWIT	76,691	25,487,461,072	66,306,870,515
2016	MATRAMAN	27,921	4,647,007,434	27,515,250,245
2016	PULO GADUNG	48,243	15,205,579,496	97,802,391,508
2016	CAKUNG	87,958	72,987,351,083	240,157,604,229

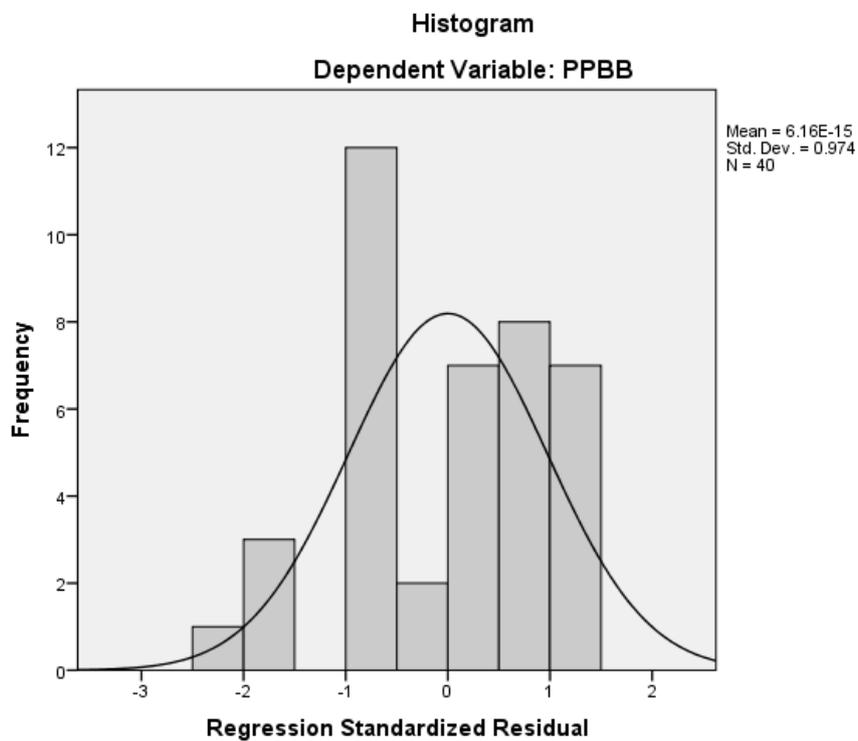
LAMPIRAN 6 :**Data Ln Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y)**

TAHUN	KECAMATAN	Ln_WP	Ln_TUNGGAKAN	Ln_PENERIMAAN
2013	PASAR REBO	10.41	21.92	23.51
2013	CIRACAS	10.76	22.59	24.01
2013	CIPAYUNG	10.78	23.03	23.88
2013	KRAMAT JATI	10.85	22.76	24.60
2013	MAKASAR	10.34	22.23	24.36
2013	JATINEGARA	10.78	22.33	24.10
2013	DUREN SAWIT	11.23	23.40	24.48
2013	MATRAMAN	10.23	21.44	23.49
2013	PULO GADUNG	10.73	22.98	24.76
2013	CAKUNG	11.30	23.79	25.46
2014	PASAR REBO	10.41	22.68	24.01
2014	CIRACAS	10.78	23.32	24.42
2014	CIPAYUNG	10.79	23.74	24.26
2014	KRAMAT JATI	10.86	23.43	24.97
2014	MAKASAR	10.34	22.54	24.71
2014	JATINEGARA	10.78	22.93	24.65
2014	DUREN SAWIT	11.23	23.85	24.82
2014	MATRAMAN	10.23	21.92	23.78
2014	PULO GADUNG	10.77	23.44	25.18
2014	CAKUNG	11.31	24.55	25.94
2015	PASAR REBO	10.42	22.95	24.29
2015	CIRACAS	10.80	23.57	24.72
2015	CIPAYUNG	10.81	24.05	24.59
2015	KRAMAT JATI	10.87	23.73	25.14
2015	MAKASAR	10.35	23.10	24.86
2015	JATINEGARA	10.79	23.29	24.85
2015	DUREN SAWIT	11.23	24.11	25.02
2015	MATRAMAN	10.23	22.33	24.14
2015	PULO GADUNG	10.78	23.61	25.27

2015	CAKUNG	11.32	24.69	26.14
2016	PASAR REBO	10.43	22.98	24.14
2016	CIRACAS	10.83	23.50	24.63
2016	CIPAYUNG	10.84	24.01	24.56
2016	KRAMAT JATI	10.88	23.60	25.19
2016	MAKASAR	10.37	22.77	24.85
2016	JATINEGARA	10.95	23.07	24.80
2016	DUREN SAWIT	11.25	23.96	24.92
2016	MATRAMAN	10.24	22.26	24.04
2016	PULO GADUNG	10.78	23.44	25.31
2016	CAKUNG	11.38	25.01	26.20

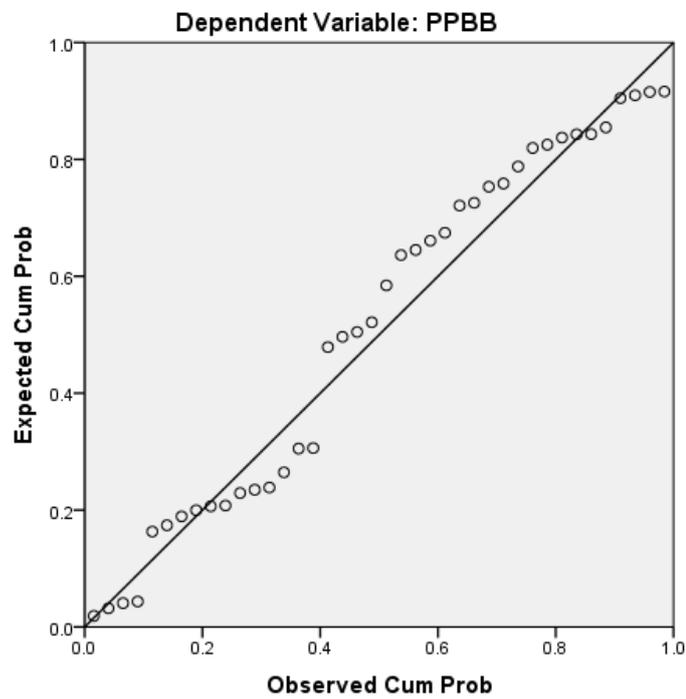
LAMPIRAN 7 :**Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 24****Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
WP	40	10.23	11.38	10.7608	.34118
TP	40	21.44	25.01	23.2232	.77947
PPBB	40	23.49	26.20	24.6764	.63046
Valid N (listwise)	40				

Uji Normalitas - Histogram

Uji Normalitas - Normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35321950
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.099
	Negative	-.115
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

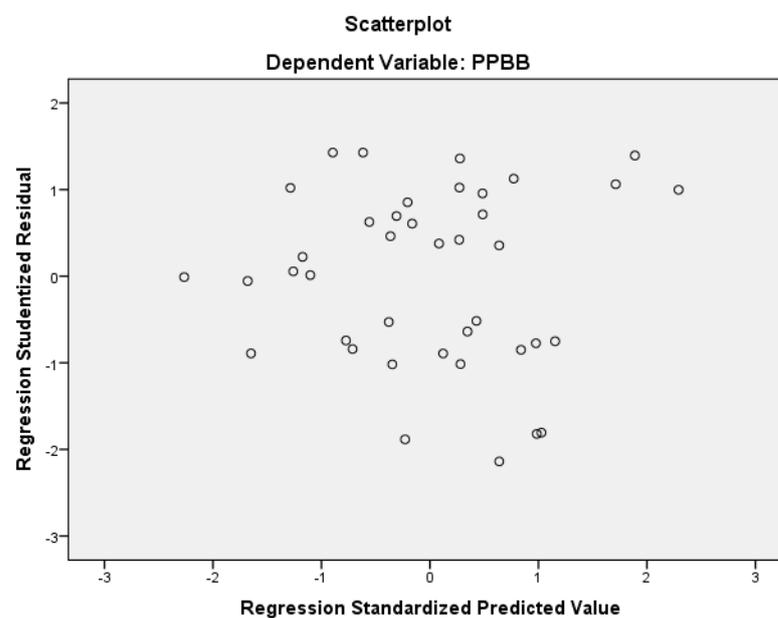
Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04838
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	16
Z	-1.442
Asymp. Sig. (2-tailed)	.149

a. Median

Uji Heteroskedastisitas-Scatterplot



Uji Heteroskedastisitas - Uji White

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 ^a	.249	.139	.12234

a. Predictors: (Constant), WPTP, WP, TP, TPkuadrat, WPkuadrat

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.960	1.867		4.798	.000		
	WP	.072	.311	.039	.233	.817	.299	3.347
	TP	.643	.136	.795	4.720	.000	.299	3.347

a. Dependent Variable: PPBB

Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.636	2	5.318	40.439	.000 ^b
	Residual	4.866	37	.132		
	Total	15.502	39			

a. Dependent Variable: PPBB

b. Predictors: (Constant), TP, WP

Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.669	.36264	1.517

a. Predictors: (Constant), TP, WP

b. Dependent Variable: PPBB

RIWAYAT HIDUP



Della Victorya, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Drs. Zahrudin AR, MMSi dan Aulina Istiyani di Jakarta, 29 Desember 1994. Bertempat tinggal di Jalan Balap Sepeda VII No.14 Kel.Jati, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Pendidikan formal penulis dimulai dari TK Aisyiah 48 Jakarta tahun 1999-2001, SDN 03 Jati tahun 2001-2007, SMPN 99 Jakarta tahun 2007-2010, SMAN 31 Jakarta tahun 2010-2013, selanjutnya peneliti mengikuti jalur SNMPTN yang menghantarkannya ke Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi di tahun 2013.

Selama dibangku perkuliahan, penulis pernah mengikuti KKL di Bursa Malaysia dan Bank Negara Malaysia, Praktik Kerja Lapangan di PT Asuransi Bangun Askrida, dan Program KKN di Desa Rancasari, Subang.